

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. (2013). *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press.
- Az, L. S. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Bank BPR. (n.d.). Retrieved April 13, 2022, from Kredit Umum: <https://www.bankboyolali.com/bpr/produk-layanan/kredit/kredit-umum>
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hayati, N. (2016). Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Suatu Tinjauan terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Barat dan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional). *Lex Jurnalica* , Vol 13, No. 3, hlm :278-289.
- Irawan, E., & Afdol. (2017). Peralihan Hak Atas Tanah Warisan yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan. *Al-Qānūn* , Vol. 20, No. 2, hlm: 275-298.
- Lubis, S. K. (2004). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (1985). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberti.
- Muhammad, A. K. (2011). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muwahid. (2016). *Pokok-pokok hukum agraria di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Natania, D. (2020). Penyampaian Akta Pemberian Hak Tanggungan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Setelah Diberlakukannya Peraturan Menteri Atr/Kbpu Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* , Vol. 3, No. 2, hlm: 273-291.
- Patrik, P., & Kashadi. (2007). *Hukum Jaminan*. Semarang: Badan Penerbit PT. Fakultas Hukum UNDIP.
- Prakoso, Andria Luhur (2016). Prinsip pertanggungjawaban perdata dalam prespektif kitab undang-undang hukum perdata dan undang-undang no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Hlm : 211-222
- Rondonuwu, G. (2017). Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. *Lex Privatum* , Vol. 5, No. 4, hlm: 114-121.

- Salim. (2012). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saranaung, F. M. (2017). Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah. *Lex Crimen* , Vol 6, No. 01, hlm: 13-21.
- Setiawan, R. (2007). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Siregar, T., Marbuni, J., & Siregar, S. A. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Kepastian Hukum Akta Perjanjian Jual Beli Yang Objeknya Dijadikan Jaminan Di Bank. *Jurnal Retentrum* , Vol 1, No 2, hlm: 101-109.
- Soekanto. (1996). *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-4*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudaryono dan Surbakti, Natangsa. (2017) *Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Perss.
- Suriasumantri, J. S. (2005). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum Hak Tanggungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2007). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2010). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Gratika.

Undang-undang

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nmor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan